



# RENCANA KERJA

TAHUN  
2023

# DPPKB KOTA BANDUNG

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KOTA BANDUNG



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL .....	4
KATA PENGANTAR.....	5
BAB I.....	7
PENDAHULUAN.....	7
1.1. Latar Belakang.....	7
1.2. Landasan Hukum.....	10
1.3. Maksud dan Tujuan .....	12
1.4. Sistematika Penulisan .....	12
BAB IV PENUTUP.....	15
BAB II.....	16
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	16
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renja .....	16
Tabel 2.1 .....	20
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Tahun 2019 DPPKB Kota Bandung.....	20
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	30
2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	33
Tabel 2.2 .....	33
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bandung pada DPPKB.....	33
Tahun 2023.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 2.3 .....	35
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD DPPKB Kota Bandung Tahun 2023 .....	35
BAB III.....	49
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	49
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	49
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2023 .....	52



3.3 Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2023.....	53
Tabel 3.2 .....	58
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	58
Kota Bandung Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 .....	58
BAB IV.....	65
PENUTUP.....	65
4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja .....	65
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan .....	65
4.3. Rencana Tindak Lanjut.....	66



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 .....	20
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Tahun 2019 DPPKB Kota Bandung .....	20
Tabel 2.2 .....	33
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bandung pada DPPKB.....	33
Tahun 2023.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 2.3 .....	35
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD DPPKB Kota Bandung Tahun 2023 .....	35



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2023 telah selesai disusun, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berfungsi untuk menerjemahkan secara operasional perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis yang berfungsi menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sebagai implementasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2023, merupakan penjabaran tahun ketiga Rencana Strategis Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2018 - 2023.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2023 untuk menjaga kesinambungan dan sinergitas kegiatan sehingga dapat secara konstruktif mendukung proses pembangunan di



Kota Bandung. Selain itu, dokumen rencana kerja ini dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat akuntabilitas dan transparansi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kepada seluruh *stakeholders*, serta dasar dalam mengukur keberhasilan mendukung pencapaian visi dan misi Kota Bandung.

Bandung, November 2022

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA BANDUNG,**

**DEWI KANIASARI, S.Sos., MA.**  
NIP. 19690604 199503 2 004



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi perangkat daerah, Renja-PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan dan Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja-PD disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja-PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan selanjutnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja-PD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja-PD sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja-PD sangat



ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, proses penyusunan Renja-PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan Renja-PD, tahap penyusunan rancangan Renja-PD, dan tahap penetapan Renja-PD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Renja-PD, orientasi mengenai Renja-PD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja-PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja-PD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja-PD dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra-PD. Tahap penetapan rancangan akhir Renja-PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja-PD untuk menjadi pedoman dilingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2023, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 1388 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota bandung dalam mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi





kewenangan Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

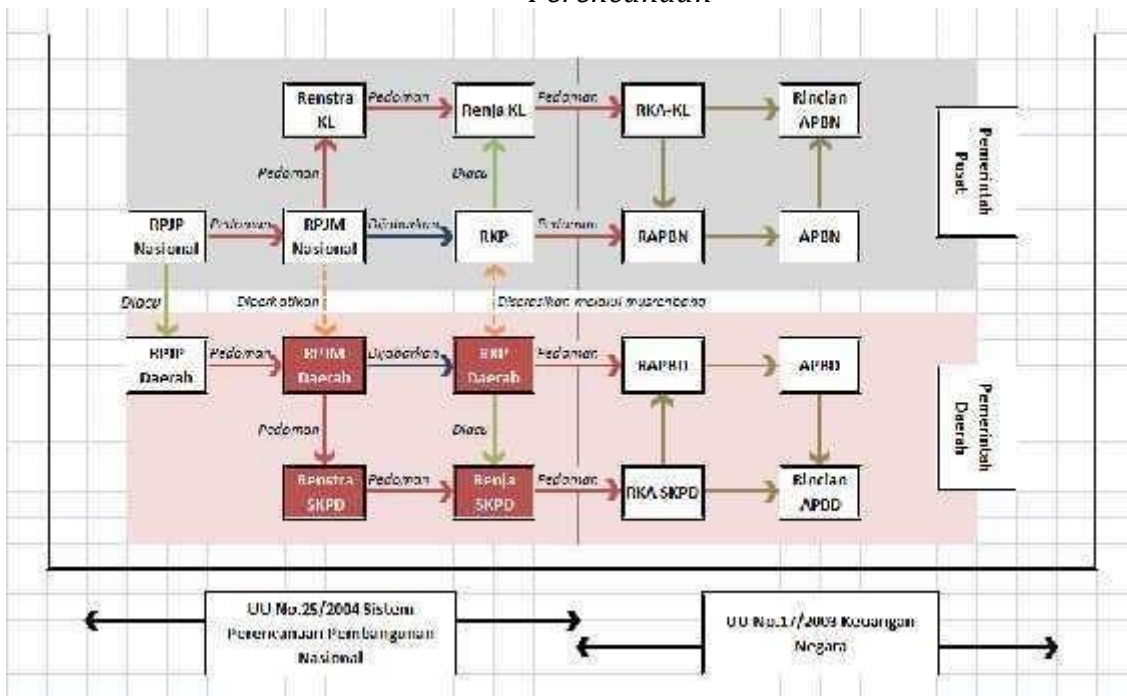
- a. perumusan kebijakan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2023 memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan harus mengarah pada pencapaian target dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Program dan Kegiatan harus mengarah pada pencapaian target dalam Indikator Kinerja Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Program dan Kegiatan harus mendukung Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota.



Gambar 1-1 Keterkaitan Dokumen  
Perencanaan



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung adalah :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana



- Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
  - j. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - k. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2005-2025;
  - l. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
  - m. Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018- 2023;
  - n. Peraturan Wali Kota Bandung No 121 Tahun 2010 tentang Tahapan,



## Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan menjadi acuan bagi penilaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan visi misi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2023 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2023 dengan mengacu pada RKPD Kota Bandung Tahun 2023.
2. Pedoman bagi seluruh jajaran aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan program/kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
3. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Bandung Tahun 2023.

### 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

##### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja-PD, proses penyusunan Renja-PD, keterkaitan antara Renja-PD dengan dokumen RKPD, Renstra-PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan



perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja- PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja-PD, serta susunan garis besar isi dokumen

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu (tahun 2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2023), mengacu pada APBD 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra-PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya.

### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### **2.3 Isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, subbab ini berisi uraian mengenai:**

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,



terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);

- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah; dan
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun rencana.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, ROGRAM, DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional**

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

#### **3.2. Tujuan dan sasaran Renja-PD**

Meningkatnya Pengendalian Penduduk Melalui Keluarga yang Berkualitas.

#### **3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:**

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan capaian program dan kegiatan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, misalnya pencapaian Indikator Kinerja Utama terhadap sasaran



program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bandung.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi :
  - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
- c. Tabel rencana program dan kegiatan

#### **BAB IV PENUTUP**



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renja

Dalam rangka memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian Renja. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian Renja adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renja perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam penyusunan perencanaan Tahun 2023, hasil evaluasi kinerja pada tahun 2022 menjadi salah satu input penting untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung pada tahun 2022 telah melaksanakan 4 program, yang terdiri atas 3 (tiga) program urusan dan 1 (satu) Program yang sifatnya non urusan/*supporting*. Terhadap program yang terkait dengan urusan dapat dianalisis sebagai berikut :

1. **Program Pengendalian Penduduk**, Indikator programnya terdiri dari Rumah Dataku Aktif, Sekolah Siaga Kependudukan Aktif dan Cakupan laporan kependudukan dan keluarga melalui aplikasi SR BKKBN yang akurat dan tepat waktu, yang difasilitasi anggaran sebesar Rp. 849.881.700,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 677.991.200,00 atau sebesar 79,77%. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian program diantaranya :
  - a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, indikator kegiatannya adalah Persentase kerjasama dengan Sekolah yang mendapatkan pembinaan wawasan kependudukan Meningkat, dengan target 16.36%. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 16.36%.
  - b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah





Kabupaten/Kota, indikator kegiatannya adalah Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data (parameter dan penduduk) untuk perencanaan dan program pembangunan, dengan target masing-masing sebesar 1 Sektor. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

2. **Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**, mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 16.026.939.885,00** yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBN dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 13.720.961.231,00** atau sebesar **85.61%**. Indikator programnya adalah Angka Pemakaian Kontrasepsi/Mcpr dan Cakupan Kebutuhan KB yang Belum Terpenuhi (Unmeet Need) (Nilai Pembalik). Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian program diantaranya:

- a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, indikator kegiatannya adalah Jumlah Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kearifan budaya lokal terlaksana dengan baik. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 30 Kecamatan.
- b. *Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)*, indikator kegiatannya adalah Rasio Penyuluh KB dan Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD setiap kelurahan, dengan target 3.51%. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 3.51%.
- c. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, indikator kegiatannya adalah Pelaksanaan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor dan Pembinaan di Kampung Meningkatkan



dengan target 30 Kecamatan. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

3. **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**, mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 12.562.125.850,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 8.893.284.500,00** atau sebesar **70.79%**. Indikator programnya adalah Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian program diantaranya:

- a. *Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*, indikator kegiatannya adalah Kegiatan Promosi, Sosialisasi dan Edukasi Lingkup Kelompok Kegiatan Ketahanan Remaja, Balita, Anak dan Lansia Terlaksana dengan baik, dengan target 30 Kelompok. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
  - b. *Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*, indikator kegiatannya adalah Evaluasi Dampak Program Lingkup Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Terlaksana, dengan target 30 Kecamatan. Proporsi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
-

c.




**RENCANA KERJA  
DPPKB  
TAHUN 2023**


Tabel 2.1

**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Tahun 2022  
DPPKB Kota Bandung**

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Dinas Pengendalian Penduduk</b>	#####	<b>35.429.823.905</b>	<b>80,72%</b>			
<b>2.14.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>14.451.981.543</b>	<b>12.137.586.974</b>	<b>83,99%</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>82%</b>	<b>85,25%</b>
<b>2.14.01.20.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>179.072.400</b>	<b>163.282.400</b>	<b>91,18%</b>	<b>Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>2.14.01.2.01.01</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.432.400	39.182.400	88,18%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	78.000.000	78.000.000	100,00%	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.640.000	46.100.000	81,39%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1
<b>2.14.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	#####	<b>8.254.180.694</b>	<b>81,25%</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.123.919.789	8.242.168.694	81,41%	Jumlah Laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	12	12
2.14.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.840.000	5.460.000	25,00%	Tersedianya Bahan Pelaksanaan Verifikasi	14	14


2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.552.000	 6.552.000	100,00%	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan <b>TAHUN 2023</b>	2	2
					Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	1
2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.072.000	0	0,00%	Jumlah Laporan Bulanan/Semester	14	14
					Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1
					Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan dan semesteran	14	14
2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.920.000	-	0,00%	<b>Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
2.14.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Sekretariat)	24.920.000		0,00%	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Sekretariat)	1	1
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	443.449.950	421.411.400	95,03%	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (laporan)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
2.14.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	157.250.000	147.775.000	93,97%	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terealisasi	60	60
2.14.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	286.199.950	273.636.400	95,61%	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	1
2.14.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.000.129.884</b>	<b>906.039.144</b>	<b>90,59%</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan (laporan)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.020.300	23.020.300	100,00%	Cakupan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%
2.14.01.2.06.02	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	281.996.300	281.254.400	99,74%	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	18	18
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	89.871.900	88.875.300	98,89%	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	4

 <b>BENGKALU PROVINSI</b> <b>DAERAH PEMERINTAH</b> <b>TAHUN 2023</b>							
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	173.526.300	166.568.800	95,99%	Jumlah Laporan Penyediaan Makanan dan Minuman	1	1
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	137.589.084	121.511.950	88,32%	Jumlah Laporan Barang Cetak dan Penggandaan	1	1
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37.092.000	37.092.000	100,00%	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	2
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	257.034.000	187.716.394	73,03%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur	1	1
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>1.219.257.520</b>	<b>1.127.791.277</b>	<b>92,50%</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100,00%	Jumlah laporan jasa surat menyurat	1	1
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215.450.000	123.983.757	57,55%	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	4	4
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	998.807.520	998.807.520	100,00%	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>1.425.768.000</b>	<b>1.264.882.059</b>	<b>88,72%</b>	<b>Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	757.450.000	630.091.359	83,19%	Jumlah Unit Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan dibayarkan perizinannya	49	49
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	310.810.000	281.309.300	90,51%	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan dibayarkan perizinannya	74	74

2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	218.611.000	 218.254.000	99,84%	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara <b>RENCANA KERJA DPPKB TAHUN 2023</b>	1	1
2.14.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.750.000	33.750.000	100,00%	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1
2.14.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.147.000	101.477.400	96,51%	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1
2.14.02	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>849.881.700</b>	<b>677.991.200</b>	<b>79,77%</b>	<b>Sekolah Siaga Kependudukan Aktif</b>	<b>24,00%</b>	<b>24,00%</b>
					<b>Cakupan Laporan Kependudukan dan Keluarga melalui Laporan SR BKKBN yang akurat dan tepat waktu</b>	<b>90,00%</b>	<b>90,00%</b>
					<b>Rumah DataKu Aktif</b>	<b>13,84%</b>	<b>13,84%</b>
2.14.02.2.01	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>131.492.000</b>	<b>130.292.000</b>	<b>99,09%</b>	<b>Jumlah SMP Negeri yang melakukan MOU dengan DPPKB dibagi Jumlah Seluruh SMP Negeri di Kota Bandung</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	131.492.000	130.292.000	99,09%	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	13	13
2.14.02.2.02	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>718.389.700</b>	<b>547.699.200</b>	<b>76,24%</b>	<b>Jumlah Laporan yang akurat dan tepat waktu dibagi Jumlah Kecamatan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	101.464.000	101.432.000	99,97%	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi Rumah DataKu di Kampung KB	4	4
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	567.258.500	396.600.000	69,92%	Jumlah Dokumen Penyusunan Data dan Informasi Penduduk dan Keluarga	12	12
2.14.02.2.02	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga (DAK Non Fisik)	49.667.200	49.667.200	100,00%	Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	12	12

<b>2.14.03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>16.026.939.885</b>	<b>13.720.961.231</b>	<b>85,61%</b>	<b>Angka Pemakaian Kontrasepsi/Mcpr</b>	<b>60,00%</b>	<b>61,42%</b>
					<b>Cakupan Kebutuhan KB yang Belum Terpenuhi (Unmeet Need) (Nilai Pembalik)</b>	<b>25,00%</b>	<b>22,19%</b>
					<b>Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Penyuluhan dan Penggerakan</b>	<b>81,56%</b>	<b>81,56%</b>
					<b>Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Keluarga Berencana</b>	<b>91,23%</b>	<b>92,23%</b>
<b>2.14.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>3.089.559.500</b>	<b>2.790.738.500</b>	<b>90,33%</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (DAK Non Fisik)	4.375.000		0,00%	Jumlah Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1	1
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal (DAK Non Fisik)	406.410.000	405.910.000	99,88%	Jumlah Kecamatan yang mendapat Penyuluhan KIE bergerak dan Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Tingkat Kota Bandung.	30	30
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000	24.535.000	98,14%	Jumlah Kecamatan yang mendapat Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	30	30
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (DAK Non Fisik)	70.640.000	69.674.000	98,63%	Jumlah KIE Program KKBPK melalui Media Massa, Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	30	30
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	206.406.500	205.891.500	99,75%	Jumlah promosi KIE melalui media massa cetak dan elektronik	1	1




2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (DAK Non Fisik)	1.872.000.000	 1.630.100.000	87,08%	<b>RENCANA KERJA DPPKB TAHUN 2023</b> Jumlah Laporan Pelaksanaan BOKB	1	1
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK (DAK Non Fisik)	504.728.000	454.628.000	90,07%	Jumlah Laporan Pengelolaan Manajemen BOKB	1	1
<b>2.14.03.2.02</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>4.568.772.935</b>	<b>4.409.915.000</b>	<b>96,52%</b>	<b>Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) DAK Non Fisik	856.322.935	713.475.000	83,32%	Dokumen Hasil Kegiatan Mekanisme Operasional Pelaksanaan KIE oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)	1	1
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	3.712.450.000	3.696.440.000	99,57%	Jumlah Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1	1
<b>2.14.03.2.03.01</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.779.994.900</b>	<b>4.043.675.991</b>	<b>69,96%</b>	<b>Jumlah Fasyankes yang mendapatkan Distribusi, Alat, Obat dan Kontrasepsi</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK Non Fisik)	63.450.000	63.450.000	100,00%	Jumlah Fasyankes yang mendapatkan Distribusi, Alat, Obat dan Kontrasepsi	90	90
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (DAK Non Fisik)	4.509.937.900	2.851.756.600	63,23%	Jumlah Fasyankes yang mendapatkan Distribusi, Alat, Obat dan Kontrasepsi	1	1
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	33.330.000	33.330.000	100,00%	Jumlah Fasyankes yang mendapatkan Distribusi, Alat, Obat dan Kontrasepsi	1	1



2.14.03.2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	47.914.000	47.914.000	100,00%	<b>RENCANA KERJA</b> Jumlah Fasyankes yang mendapatkan Distribusi, Alat, Obat dan Kontrasepsi	71	71
2.14.03.2.03.05	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (DAK Fisik)	843.675.000	767.037.391	90,92%	Jumlah Laporan Kegiatan DAK Fisik	1	1
2.14.03.2.03.06	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	128.520.000	128.520.000	100,00%	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Bagi Peserta KB	30	30
2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK Non Fisik)	42.600.000	42.600.000	100,00%	Jumlah Koordinasi Pelayanan KB di Faskes	30	30
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK Non Fisik)	3.000.000	1.500.000	50,00%	Pembinaan Pelayanan KB di Faskes	71	71
2.14.03.2.03.08	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	27.904.000	27.904.000	100,00%	Jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS dibagi Jumlah Faskes dan jejaring dikalli 100%	100%	100%
2.14.03.2.03.09	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	79.664.000	79.664.000	100,00%	Jumlah Peserta KB Baru dan Ganti Cara	12	12
<b>2.14.03.2.03.11</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>2.588.612.550</b>	<b>2.476.631.740</b>	<b>95,67%</b>	<b>Jumlah Kampung KB yang di Advokasi &amp; digerakan</b>	<b>65</b>	<b>1</b>
2.14.03.2.04.03	<b>Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</b>	129.900.000	79.162.000	60,94%	<b>Jumlah Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</b>	1	1

2.14.03.2.04.02	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (DAK Non Fisik)	1.052.250.000	1.046.252.000	99,43%	Jumlah kampung KB yang melaksanakan kegiatan operasional ketahanan keluarga	65	65
2.14.03.2.04.03	Pembinaan Terpadu Kampung KB	1.406.462.550	1.351.217.740	96,07%	Jumlah Kampung KB yang Mendapatkan Pembinaan	65	65
<b>2.14.03.2.04.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>12.562.125.850</b>	<b>8.893.284.500</b>	<b>70,79%</b>	<b>Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>89,69%</b>	<b>90,77%</b>
					<b>Nilai Variabel Ibangga lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>50,18%</b>	<b>50,18%</b>
<b>2.14.04.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>#####</b>	<b>8.661.546.500</b>	<b>70,30%</b>	<b>Laporan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Keluarga</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
2.14.04.2.01.01	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	67.956.000	67.956.000	100,00%	Terpenuhinya sarana unsur masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pembangunan keluarga	1	1
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DAK Fisik)	768.000.000	734.900.000	95,69%	Jumlah Laporan Pelaksanaan DAK Fisik	1	1
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	148.291.950	129.193.000	87,12%	Jumlah sebaran edukasi IBangga lingkup ketahanan keluarga balita, anak dan lansia	1	1

2.14.04.2.01.02	Orientasi/Pelatihan TeknisPelaksana/Kader Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga (BKB, BKR,BKL, PPPKS, PIK-R danPemberdayaan EkonomiKeluarga/UPPKS)	865.550.000	865.550.000	100,00%	<b>RENCANA KERJA DPPKB TAHUN 2023</b> Jumlah Kelompok PIK R Yang Dibina	101	101
2.14.04.2.01.04	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) DAK Non Fisik)	10.043.240.000	6.440.510.000	64,13%	Dokumen Hasil Pelaksanaan Operasional Tim Pendamping Keluarga	1	1
2.14.04.2.01.05	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	225.609.900	221.007.500	97,96%	Jumlah Kelompok BKB, BKL yang mendapatkan pembinaan	60	60
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	202.430.000	202.430.000	100,00%	<b>Terpilihnya Duta GenRe</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>2.14.04.2.01.08</b>	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>241.048.000</b>	<b>231.738.000</b>	<b>96,14%</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS</b>	<b>1600</b>	<b>450</b>

2.14.04.2.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	241.048.000	 231.738.000	96,14%	<b>RENCANA KERJA DPPKB TAHUN 2023</b>  Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS	1600	1600
--------------	--	-------------	---	--------	---	------	------



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui Rencana Kerja yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 08 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung sebagai sub dari sistem Pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tahapan sebagai berikut: (1) persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, (2) penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, (3) penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dan (4) penetapan Renja Perangkat Daerah dengan indikator sebagai berikut:

1. menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Dinas berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
3. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan



umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai;

4. membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
5. melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
6. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Kepala Seksi;
7. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan,
8. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Dinas;
9. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Dinas;
10. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
11. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas;
14. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Dinas;
15. melaksanakan pembinaan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
16. menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan Dinas dalam lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
17. merumuskan kebijakan teknis Daerah lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
18. menyelenggarakan dan mengoordinasikan perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
19. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
20. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;



21. menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan melaksanakan tugas lainnya dari Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung yang berkaitan dengan penyusunan dokumen pengendalian penduduk dan keluarga berencana, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya jumlah SDM ASN DPPKB yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan dengan tugas dan fungsinya.
2. Masih kurangnya jumlah SDM DPPKB Non ASN Tenaga Penggerak Kelurahan (TPK) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sebagai petugas lini lapangan, sampai saat ini baru terisi sebanyak 34,43% yang ditempatkan di seluruh kelurahan di Kota Bandung.
3. SOP untuk sebagian kegiatan pada DPPKB belum disusun serta SOP yang telah ada belum diterapkan secara optimal.
4. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan DPPKB.
5. Belum terintegrasinya program lintas sektoral bagi yang membutuhkan data dan informasi koordinasi dari instansi lain.
6. Menurunnya animo masyarakat untuk partisipasi dalam program Keluarga Berencana.
7. Kondisi saat ini yang mendesak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung untuk memiliki Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga untuk memayungi perubahan kondisi sosial keluarga yang terjadi secara cepat.
8. Kondisi sarana dan prasarana gedung kantor yang saat ini kurang memadai karena minimnya lahan dan ruang, sehingga tidak seimbang antara jumlah personil DPPKB yang ada dengan ruang yang dapat dimanfaatkan, terlebih lagi dibutuhkan ruang yang dapat menampung tenaga lini lapangan untuk konsolidasi program kegiatan. Selain itu,



kondisi gedung kantor yang sudah usang dan terdapat kerusakan pada beberapa bagian. Diharapkan dengan pembangunan gedung baru dapat menampung lebih banyak personil DPPKB, khususnya dalam melaksanakan kegiatan konsolidasi dengan petugas lini lapangan sehingga program kegiatan dapat lebih tersampaikan ke masyarakat melalui para petugas lini lapangan dengan tersedianya ruangan yang memadai.

Dalam perkembangannya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, diharapkan dapat menjadi organisasi perangkat daerah yang lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM, memantapkan kelembagaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

### **2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pelayanan keluarga berencana antara lain dimaksudkan agar layanan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi DPPKB adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian





yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Perumuskan Kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro dengan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung. Sedangkan rumusan kebijakan dalam konteks organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung mengacu pada Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung yang merupakan turunan dari RPJMD Kota Bandung. Adapun strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Keluarga Berencana
2. Pengembangan kapasitas aparatur dengan meningkatkan kemampuan dalam menyapaikan dan mengelola program kegiatan Keluarga Berencana;
3. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Memanfaatkan *database* Pendataan Keluarga 2020 dalam mengembangkan pendekatan upaya advokasi, penggerakan, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada perangkat daerah terkait dan masyarakat luas;
5. Mengembangkan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan Permenpan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional untuk meningkatkan peran dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
6. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dengan mengikuti diklat fungsional dan diklat pengadaan barang/jasa, dan diklat lainnya yang terkait;
7. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas untuk mengembangkan urusan kewenangan yang ada;
8. Menerapkan *reward and punishment* dengan standar kriteria kinerja yang pasti;
9. Mengadakan event-event yang mensosialisasikan proses, produk dan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
10. Memberdayakan peran SDM Aparatur dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) ;



11. Mengoptimalkan SDM pengelola keuangan dalam perencanaan dan pengendalian anggaran;
12. Menerapkan *merit system* dalam pemberdayaan SDM untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;



#### 2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021, menetapkan prioritas pembangunan pada Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bandung pada DPPKB**  
**Tahun 2023**

No	Strategi Sasaran	Indikator Strategi	Program Prioritas Pembangunan Daerah
1.	Meningkatnya Pengendalian Penduduk Melalui Keluarga yang Berkualitas	1. Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang Meningkatnya Ketahanan Keluarga 2. Total Fertility Rate (TFR) Maksimum	1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 2. Program Pengendalian Penduduk 3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
2.	Meningkatnya ketahanan keluarga	3. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	
<i>Sumber : Rancangan Akhir RKPD Kota Bandung 2023</i>			



Berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2023, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana program yang mendukung prioritas tersebut, yaitu :



**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Akhir RKPD DPPKB Kota Bandung**  
**Tahun 2023**

Kode					Uraian	Sumber Dana	Indikator	Satuan	Target	ANGGARAN 2023
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	1 4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					19.248.164.642
2	1 4	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.542.165.092
2	1 4	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen Perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang telah disusun	Dokumen	9	179.072.400
2	1 4	01	2.01	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	44.432.400
2	1 4	01	2.01	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	78.000.000
2	1 4	01	2.01	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	56.640.000
2	1 4	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.591.963.288
2	1 4	01	2.02	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	Laporan	12	9.556.499.288
2	1 4	01	2.02	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Terpenuhinya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	1	21.840.000
2	1 4	01	2.02	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6.552.000

**RENCANA KERJA  
D P R K E T A H U N 2 0 2 2**



Kode					Uraian	Sumber Dana	Indikator	Satuan	Target	ANGGARAN 2023
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						
2	14	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	7.072.000
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>157.250.000</b>
2	14	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Laporan	1	157.250.000
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>1.074.000.884</b>
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Laporan	12	23.020.300
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	12	237.966.300
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Laporan Peralatan Rumah Tangga	Laporan	1	89.871.900
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Cakupan Penyediaan Makanan dan Minuman	Persen	100	303.180.800
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan	12	136.029.584
2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Laporan	1	37.092.000
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Cakupan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sesuai prosedur konsultasi SKPD	Persen	100	246.840.000
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>1.219.257.520</b>

RENCANA KERJA  
D P R K E T A H U N 2 0 2 2



Kode					Uraian	Sumber Dana	Indikator	Satuan	Target	ANGGARAN 2023
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						
2	1 4	01	2.08	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah laporan jasa surat menyurat	Laporan	1	5.000.000
2	1 4	01	2.08	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	215.450.000
2	1 4	01	2.08	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	998.807.520
<b>2</b>	<b>1 4</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>1.320.621.000</b>
2	1 4	01	2.09	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase unit kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	%	100	757.450.000
2	1 4	01	2.09	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Unit Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	%	100	310.810.000
2	1 4	01	2.09	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	218.611.000
2	1 4	01	2.09	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Laporan	12	33.750.000
2	1 4	01	2.09	1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
<b>2</b>	<b>1 4</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>					<b>599.952.000</b>
2	1 4	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Terbentuknya Sekolah Siaga Kependudukan			145.508.000

**RENCANA KERJA  
D R B K P TAHUN 2023**



Kode					Uraian	Sumber Dana	Indikator	Satuan	Target	ANGGARAN 2023
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						
2	1 4	02	2.01	0 5	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Seklah Menengah Pertama Negeri yang melaksanakan Sekolah Siaga Kependudukan	Sekolah	15	145.508.000
2	1 4	02	2.02		<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Cakupan Data Kependudukan yang akurat dan tepat waktu</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>454.444.000</b>
2	1 4	02	2.02	0 3	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tersusunnya Profil Kependudukan	Dokumen	1	140.534.000
2	1 4	02	2.02	0 9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	12	313.910.000
2	1 4	03			<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>					<b>3.387.231.550</b>
2	1 4	03	2.01		<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>		<b>Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>30</b>	<b>544.575.000</b>
2	1 4	03	2.01	0 1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Pelaksanaan Advokasi Program KKBPK	Kegiatan	2	17.120.000
2	1 4	03	2.01	0 2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Kecamatan yang Mendapat Penyuluhan KIE Bergerak dan Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tingkat Kota Bandung	Kecamatan	30	383.775.000
2	1 4	03	2.01	0 4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Promosi KIE melalui media Massa Cetak dan Elektronik	Dokumen	1	143.680.000
2	1 4	03	2.02		<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>					<b>1.311.320.000</b>
2	1 4	03	2.02	0 1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Pembinaan Untuk PKB dan TPK	Kali	1	29.720.000
2	1 4	03	2.02	0 3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	PENDAPATAN ASLI DAERAH				0



RENCANA KERJA  
D P R K B TAHUN 2023



Kode					Uraian	Sumber Dana	Indikator	Satuan	Target	ANGGARAN 2023
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						
2	1 4	03	2.02	0 4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DAK Non Fisik- BOKB- KB; PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Laporan	1	1.281.600.000
2	1 4	03	2.03		<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>374.974.000</b>
2	1 4	03	2.03	0 3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DAK Non Fisik- BOKB- KB; PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	Persen	14,5	39.522.000
2	1 4	03	2.03	0 5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Fasyankes yang mendapatkan Distribusi Alat Obat Kontrasepsi	Fasyankes	90	56.412.000
2	1 4	03	2.03	0 7	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Bagi Peserta KB	Kali	60	153.000.000
2	1 4	03	2.03	0 9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Faskes dan Jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	40	32.272.000
2	1 4	03	2.03	1 1	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Peserta KB Baru dan Ganti Cara	Akseptor	3250	93.768.000
2	1 4	03	2.04		<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>		<b>Terbinanya Kampung KB Aktif</b>	<b>Kampung KB</b>	<b>49</b>	<b>1.156.362.550</b>
2	1 4	03	2.04	0 2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	1	129.900.000
2	1 4	03	2.04	0 4	Pembinaan Terpadu Kampung KB	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Kampung KB yang Mendapatkan Pembinaan	Kampung KB	36	1.026.462.550

RENCANA KERJA  
D E R E K E T A H U N 2 0 2 2



Kode					Uraian	Sumber Dana	Indikator	Satuan	Target	ANGGARAN 2023
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						
2	14	04			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>					<b>1.718.816.000</b>
2	14	04	2.01		<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>		<i>Terbinanya Kelompok BKB dan BKL Aktif</i>	Kelompok	220	<b>1.435.268.000</b>
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Terpenuhinya sarana unsur masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Perda Pembangunan Keluarga			67.956.000
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH - MUSRENBANG	Jumlah Kelompok PIK Remaja yang dibina	Kelompok	101	876.570.000
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Kelompok BKB dan BKL yang mendapat Pembinaan	Kelompok	220	251.192.000
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Terpilihnya Duta GenRe Kota Bandung	Pasang	3	239.550.000
2	14	04	2.02		<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>		<b>Jumlah Kader pada Kelompok UPPKS yang Mendapat Pembinaan</b>	Kelompok	<b>47</b>	<b>283.548.000</b>
2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	Orang	1600	283.548.000

RENCANA KERJA  
D P R K E T A H U N 2 0 2 3



Kode					Uraian	Sumber Dana	Indikator	Satuan	Target	ANGGARAN 2023
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						
2	1 4	04	2.02	0 4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Terlaksananya Promosi Produk UPPKS	Kecamatan	30	0



## **BAB III**

# **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sebagai Instansi yang memiliki tugas melaksanakan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung selalu mengacu pada Kebijakan Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 - 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 serta kebijakan yang termuat dalam dokumen penyusunan perencanaan yang setiap tahun diterbitkan oleh Pemerintah.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BKKBN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan nasional, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang KKB;
- Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang KKB;
- Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan KB;
- Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang KKB;
- Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional;
- Penyusunan desain Program KKBPK;
- Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS) nasional
- Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga



- Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dan Kesehatan Reproduksi (KR);
- Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- Pembinaan, pembimbingan dan fasilitas di bidang KKB.  
Selain menyelenggarakan fungsi tersebut, BKKBN juga menyelenggarakan fungsi:
- Penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang KKB;
- Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan
- Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang KKB. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti BKKBN telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian target, sasaran, visi dan misi RPJMN 2019-2023, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, oleh karena itu, visi BKKBN 2019-2023 adalah : ***“Mencapai penduduk tumbuh seimbang melalui upaya penurunan laju pertumbuhan penduduk (LPP) dan perwujudan keluarga berkualitas”***. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan Bentuk penjabaran tujuan strategis tersebut, BKKBN menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2019-2023 sebagai berikut:



1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR)
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BKKBN Provinsi Jawa Barat difokuskan pada pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan yang berbasis perencanaan pembangunan dengan berdasar pada data dan hasil penelitian/kajian lapangan yang sistematis dan komprehensif. Atas dasar tersebut, maka visi BKKBN Propinsi Jawa Barat diarahkan pada upaya pembangunan berkesinambungan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang dijadikan sebagai dasar perumusan dan implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya daerah untuk meningkatkan kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia.

Berkaitan dengan pelaksanaan visi tersebut perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat. Untuk mendukung misi kepala daerah selama periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Membentuk Manusia Pancasila yang Bertakwa;
2. Melahirkan manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif;
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan;
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat Yang Sejahtera dan Adil;

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.



### 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2023

Berdasarkan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung, maka tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari penjabaran misi, adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Sasaran Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2023**

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN
				2021	2023
Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Pengendalian Penduduk Melalui Keluarga yang Berkualitas	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan kualitas Keluarga	Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang	35,38 %	38,10 %
			Total Fertility Rate (TFR) Maksimum	2,00 %	2,00 %
		Meningkatnya ketahanan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	-	55,84 indeks
	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan DPPKB	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,50	82



### 3.3 Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2023

Pada Tahun 2023, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung akan menjalankan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen perencanaan dan Laporan evaluasi dinas Tersusun</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen pelaporan administrasi keuangan Terpenuhi</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Bahan Pelaksanaan Verifikasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Semester





Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator
	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan dan semesteran
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terpenuhi</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terealisasi
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Dokumen Administrasi Umum Perangkat daerah Terpenuhi</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai prosedur
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhi</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhi</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan dibayarkan perizinannya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan dibayarkan perizinannya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Lporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Rumah Dataku Aktif</b>
	<b>Sekolah Siaga Kependudukan Aktif</b>
	<b>Cakupan laporan kependudukan dan keluarga melalui aplikasi SR BKKBN yang akurat dan tepat waktu</b>
<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Persentase kerjasama dengan Sekolah yang mendapatkan pembinaan wawasan kependudukan Meningkat</b>
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Normal	Cakupan Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kependudukan



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data (parameter dan penduduk) untuk perencanaan dan program pembangunan
Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen penyusunan profil kependudukan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Penyusunan Data dan Informasi Penduduk dan Keluarga
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Angka Pemakaian Kontrasepsi/Mcpr</b>
	<b>Cakupan Kebutuhan KB yang Belum Terpenuhi (Unmeet Need) (Nilai Pembalik)</b>
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kearifan budaya lokal terlaksana dengan baik
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Stakeholder dan mitra kerja yang di Advokasi Program Bangsa Kencana
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kearifan budaya lokal
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Laporan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah informasi penyuluhan dan penggerakan kepada masyarakat tentang tabungan/ simpanan untuk memenuhi kebutuhan pokok.



<b>Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Rasio Penyuluh KB dan Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD setiap kelurahan</b>
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Tenaga Penyuluh dan Kader KB yang diikutsertakan dalam Pembinaan KB
	Jumlah Sarana Penyuluh Kader Keluarga Berencana
<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase KB Aktif</b>
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Faskes Stock Out IUD
	Persentase Faskes Stock Out Implan
	Persentase Faskes Stock Out Kondom
	Persentase Faskes Stock Out Suntik
	Persentase Faskes Stock Out Pil



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator
Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Fasyankes Yang Mendapatkan Distribusi Alat Obat Kontrasepsi
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Laporan Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan KB terpenuhi dengan baik
Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Persentase Peserta KB Pasca Persalinan
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Peserta KB Baru
<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>Pelaksanaan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor dan Pembinaan di Kampung Meningkatkan</b>
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kegiatan operasional lingkup keluarga sejahtera di kampung kb
Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Pembinaan Kampung KB
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator
<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Kegiatan Promosi, Sosialisasi dan Edukasi Lingkup Kelompok Kegiatan Ketahanan Remaja, Balita, Anak dan Lansia Terlaksana dengan baik</b>
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sebaran Edukasi IBangga Lingkup Ketahanan keluarga balita, anak dan lansia
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sebaran edukasi Ibangga lingkup ketahanan remaja
	Jumlah sosialisasi dan pembinaan lingkup ketahanan remaja di kampung kb
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kegiatan Operasional Lingkup Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia di Kampung KB

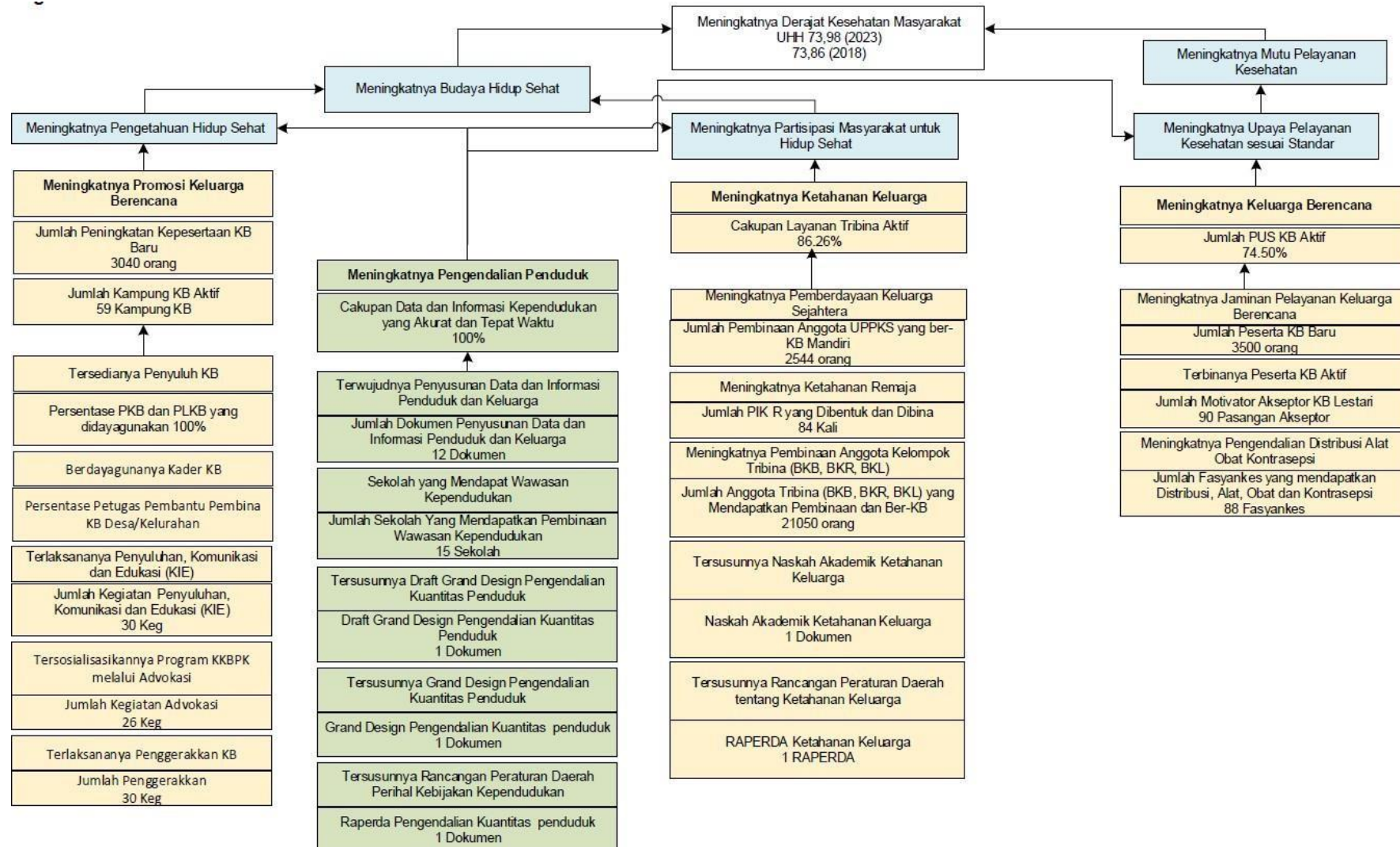


<b>Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.</b>	<b>Evaluasi Dampak Program Lingkup Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Terlaksana</b>
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan sebaran edukasi Ibangga Lingkup pemberdayaan keluarga sejahtera





**PEMETAAN KINERJA ATAS RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN KOTA  
BANDUNGTAHUN**







Tabel 3.2

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2023**

Kode					Uraian	Sumber Dana	Indikator	Satuan	Target	ANGGARAN 2023
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					19.248.164.642
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.542.165.092
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen Perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang telah disusun	Dokumen	9	179.072.400
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	44.432.400
2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	78.000.000
2	14	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	56.640.000
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.591.963.288
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	Laporan	12	9.556.499.288
2	14	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Terpenuhinya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	1	21.840.000



2	1 4	01	2.02	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6.552.000
2	14	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	7.072.000
<b>2</b>	<b>1 4</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>157.250.000</b>
2	1 4	01	2.05	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Laporan	1	157.250.000
<b>2</b>	<b>1 4</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>1.074.000.884</b>
2	1 4	01	2.06	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Laporan	12	23.020.300
2	1 4	01	2.06	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	12	237.966.300
2	1 4	01	2.06	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Laporan Peralatan Rumah Tangga	Laporan	1	89.871.900
2	1 4	01	2.06	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Cakupan Penyediaan Makanan dan Minuman	Persen	100	303.180.800
2	1 4	01	2.06	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan	12	136.029.584
2	1 4	01	2.06	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Laporan	1	37.092.000
2	1 4	01	2.06	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Cakupan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sesuai prosedur konsultasi SKPD	Persen	100	246.840.000
<b>2</b>	<b>1 4</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>1.219.257.520</b>



2	1 4	01	2.08	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah laporan jasa surat menyurat	Laporan	1	5.000.000
2	1 4	01	2.08	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	215.450.000
2	1 4	01	2.08	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	998.807.520
2	1 4	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>1.320.621.000</b>
2	1 4	01	2.09	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase unit kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	%	100	757.450.000
2	1 4	01	2.09	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Unit Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	%	100	310.810.000
2	1 4	01	2.09	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	218.611.000
2	1 4	01	2.09	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Laporan	12	33.750.000
2	1 4	01	2.09	1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
2	1 4	02			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>					<b>599.952.000</b>
2	1 4	02	2.01		<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>		<b>Terbentuknya Sekolah Siaga Kependudukan</b>			<b>145.508.000</b>
2	1 4	02	2.01	0 5	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri yang melaksanakan Sekolah Siaga Kependudukan	Sekolah	15	145.508.000
2	1 4	02	2.02		<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Cakupan Data Kependudukan yang akurat dan tepat waktu</b>	Persen	100	<b>454.444.000</b>



2	1 4	02	2.02	0 3	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tersusunnya Profil Kependudukan	Dokumen	1	140.534.000
2	1 4	02	2.02	0 9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	12	313.910.000
<b>2</b>	<b>1 4</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>					<b>3.387.231.550</b>
<b>2</b>	<b>1 4</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>		<b>Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>30</b>	<b>544.575.000</b>
2	1 4	03	2.01	0 1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Pelaksanaan Advokasi Program KKBPK	Kegiatan	2	17.120.000
2	1 4	03	2.01	0 2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Kecamatan yang Mendapat Penyuluhan KIE Bergerak dan Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tingkat Kota Bandung	Kecamatan	30	383.775.000
2	1 4	03	2.01	0 4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Promosi KIE melalui media Massa Cetak dan Elektronik	Dokumen	1	143.680.000
<b>2</b>	<b>1 4</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>					<b>1.311.320.000</b>
2	1 4	03	2.02	0 1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Pembinaan Untuk PKB dan TPK	Kali	1	29.720.000
2	1 4	03	2.02	0 3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	PENDAPATAN ASLI DAERAH				0
2	1 4	03	2.02	0 4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DAK Non Fisik-BOKB- KB; PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Laporan	1	1.281.600.000
<b>2</b>	<b>1 4</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>374.974.000</b>



2	1 4	03	2.03	0 3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DAK Non Fisik- BOKB- KB; PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	Persen	14,5	39.522.000
2	1 4	03	2.03	0 5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Fasyankes yang mendapatkan Distribusi Alat Obat Kontrasepsi	Fasyankes	90	56.412.000
2	1 4	03	2.03	0 7	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Bagi Peserta KB	Kali	60	153.000.000
2	1 4	03	2.03	0 9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase Faskes dan Jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	40	32.272.000
2	1 4	03	2.03	1 1	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Peserta KB Baru dan Ganti Cara	Akseptor	3250	93.768.000
2	1 4	03	2.04		<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>		<b>Terbinanya Kampung KB Aktif</b>	<b>Kampung KB</b>	<b>49</b>	<b>1.156.362.550</b>
2	1 4	03	2.04	0 2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	1	129.900.000
2	1 4	03	2.04	0 4	Pembinaan Terpadu Kampung KB	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Kampung KB yang Mendapatkan Pembinaan	Kampung KB	36	1.026.462.550
2	1 4	04			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>					<b>1.718.816.000</b>
2	1 4	04	2.01		<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>		<b>Terbinanya Kelompok BKB dan BKL Aktif</b>	<b>Kelompok</b>	<b>220</b>	<b>1.435.268.000</b>
2	1 4	04	2.01	0 2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Terpenuhinya sarana unsur masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Perda Pembangunan Keluarga			67.956.000



2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH - MUSRENBANG	Jumlah Kelompok PIK Remaja yang dibina	Kelompok	101	876.570.000
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Kelompok BKB dan BKL yang mendapat Pembinaan	Kelompok	220	251.192.000
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Terpilihnya Duta GenRe Kota Bandung	Pasang	3	239.550.000
2	14	04	2.02		<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>		<b>Jumlah Kader pada Kelompok UPPKS yang Mendapat Pembinaan</b>	<b>Kelompok</b>	<b>47</b>	<b>283.548.000</b>
2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	Orang	1600	283.548.000
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Terlaksananya Promosi Produk UPPKS	Kecamatan	30	0



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2023 adalah Penjabaran Tahun Ketiga Rencana Strategis 2018 - 2023. Tahun 2023 merupakan tahun yang tepat untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas penetapan pencapaian target kinerja yang telah disusun pada tahun-tahun sebelumnya dalam rangka pencapaian target yang akan dicapai 5 tahun mendatang berdasarkan capaian kinerja yang telah dihasilkan pada periode Rencana Strategis sebelumnya yaitu tahun 2013-2018 dan Rencana Kerja tahun 2023.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2023.

Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing struktural terkait.

#### 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2023, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2023 sebagai berikut:



Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 baik yang bersumber dari APBD Kota, maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya (RPJMN, RKP, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kota Bandung, RPJMD Kota Bandung, RKPD Kota Bandung dan Renstra-PD);

- a. Anggaran berbasis kebutuhan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 sebagai bentuk penerapan sistem informasi rencana dan anggaran di Kota Bandung.

### 4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dalam menghadapi tugas dan kewenangan yang semakin kompleks, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Dalam rangka sinergitas perencanaan, untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas program dan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- b. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- d. Peningkatan kapasitas SDM aparatur diperlukan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan yang semakin kompleks.
- e. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur.
- f. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung Tahun 2023, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
- g. Rencanakerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa






mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

---

Bandung, November 2022

KEPALA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KOTA BANDUNG,

  
DEWI KANIASARI, S.Sos., MA.  
NIP. 19690604 199503 2 004